

ANALISIS KESENJANGAN KESEMPATAN KERJA DAN TINGKAT PENDAPATAN ANTARPROPINSI DI INDONESIA

Achmad Rozany Nurmanaf ¹⁾

ABSTRACT

Two important indicators of economic development program achievements are labor absorption rate and income level of society. To gain these indicators increasing is tightly related to efficiency level of resources allocation. Unfortunately, the potency of resources and the efficiency of their allocation are not distributed equally among regions and provinces. By using Theil's Coefficient this paper discusses the variation of labor absorption rate and income level among regions and provinces in Indonesia. Provinces where the economy is dominated by modern sector activities have higher production factor productivity and also have higher level of income. While, provinces where the economy is dominated by traditional sector activities have lower production factor productivity and have lower level of income.

Key words : Variation among regions and provinces, labor absorption and level of income.

ABSTRAK

Dua indikator penting dalam keberhasilan program pembangunan ekonomi adalah tingkat penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan kedua indikator tersebut erat hubungannya dengan tingkat efisiensi dan alokasi sumber daya. Sayangnya, potensi sumber daya dan pengalokasiannya tidak terdistribusi secara merata di antara wilayah dan propinsi di Indonesia. Dengan menggunakan Koefisien Theil, tulisan ini mendiskusikan variasi penyerapan tenaga kerja dan tingkat pendapatan di antara propinsi dan wilayah. Propinsi-propinsi yang perekonomiannya didominasi oleh kegiatan sektor modern mempunyai produktivitas faktor-faktor produksi yang lebih tinggi dan tingkat pendapatannya pun demikian pula. Sementara, propinsi-propinsi yang perekonomiannya didominasi oleh aktivitas di sektor tradisional memiliki produktivitas faktor-faktor produksi dan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Kata kunci : Variasi antarpropinsi dan wilayah, kesempatan kerja dan tingkat pendapatan.

PENDAHULUAN

Dari banyak indikator yang dapat dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan program pembangunan, dua di antaranya adalah kesempatan kerja yang tersedia dan tingkat pendapatan anggota masyarakat. Pencapaian perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan erat hubungannya dengan tingkat efisiensi pemanfaatan/pengalokasian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan perkataan lain bahwa semakin efisien pemanfaatan kedua sumber daya tersebut dapat diharapkan adanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Artinya, program pembangunan yang mampu mencapai salah satu atau kedua sasaran ini dinilai sebagai program pembangunan yang berhasil.

1) Staf Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Pada kenyataannya tidak hanya potensi sumber daya tersebut yang bervariasi antarwilayah dan propinsi, tapi tingkat efisiensi pemanfaatan dan pengalokasiannya pun berbeda pula. Dengan demikian dapat dimengerti bila perbedaan-perbedaan ini menyebabkan perbedaan pada tingkat pendapatan dan kesempatan kerja anggota masyarakat. Lebih spesifik, Marisa dan Hutabarat (1988) dan Nurmanaf (1989) mengidentifikasi bahwa ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan variasi distribusi faktor-faktor produksi yang ada. Sementara di bagian lain laporannya, kedua penelitian tersebut sependapat bahwa distribusi kesempatan kerja pun memiliki kecenderungan yang serupa. Dengan demikian tidak mengherankan bila keberhasilan program pembangunan juga berbeda-beda antarwilayah dan antarpropinsi. Namun demikian dengan manajemen pembangunan yang bersifat sentral, wilayah dan propinsi yang memiliki potensi sumber daya yang minim dapat disumbang oleh wilayah dan propinsi lain yang memiliki sumber daya yang melimpah. Oleh karena itu perbedaan keberhasilan program pembangunan antarwilayah diharapkan dapat berkurang.

Akan tetapi, tetap disadari bahwa kesenjangan tersebut masih ada. Islam dan Khan (1986) mengidentifikasi bahwa tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masing-masing propinsi di Indonesia konsisten dengan distribusi sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan industri yang ada. Secara lebih spesifik, Hirsh *et al.* (1980) dan Plotnick (1982) menggambarkan bahwa penguasaan sumber daya alam seperti lahan pertanian produktif dan sumber daya manusia yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan turut berperan pula, tidak hanya terhadap tingkat pendapatan tapi juga terhadap ketersediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Untuk menjawab pertanyaan berapa besar kesenjangan kesempatan kerja dan tingkat pendapatan antarwilayah dan antarpropinsi dewasa ini, kiranya diperlukan telaahan yang lebih spesifik. Dengan menggunakan Koefisien Theil, tulisan ini mencoba mengungkapkan variasi atau keragaman kedua indikator tersebut antarwilayah dan antarpropinsi di Indonesia. Selanjutnya dari temuan ini diharapkan dapat dijelaskan dan diidentifikasi faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan adanya kesenjangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Definisi dan Kriteria

Dengan menggunakan data dari Statistik Indonesia 1995 yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), beberapa parameter yang dipergunakan dalam analisis didefinisikan secara umum sebagai berikut. Penduduk usia kerja, adalah penduduk yang berumur 10 tahun dan lebih. Pekerja, adalah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Kesempatan kerja, dihitung sebagai proporsi jumlah penduduk yang bekerja terhadap total usia kerja. Tingkat pendapatan dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan PDRB tersebut dihitung atas dasar harga berlaku dan tidak memasukkan minyak bumi dan hasil-hasilnya. Informasi-informasi ini merupakan data dasar analisis dalam tulisan ini.

Pewilayahan

Untuk mengetahui variasi kesempatan dan tingkat pendapatan antarpropinsi dan wilayah, ke 27 propinsi di Indonesia dikelompokkan menurut wilayah yang umumnya identik dengan pulau-pulau utama seperti berikut.

- **Wilayah Sumatera.** Propinsi-propinsi yang tercakup dalam wilayah ini meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.
- **Wilayah Jawa.** Meliputi Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.
- **Wilayah Kalimantan.** Terdiri dari Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- **Wilayah Sulawesi.** Meliputi Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
- **Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.** Terdiri dari Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya.

Ukuran Variasi dan Keragaman

Untuk mengetahui variasi dan keragaman kesempatan kerja dan tingkat pendapatan antarwilayah dan antarpropinsi, ukuran yang dipergunakan adalah Koefisien Theil yang secara umum dapat dituliskan sebagai berikut (Fishlow, 1992 dan Levy and Chowdhury, 1993):

$$T = \sum_{i=1}^n y_i \log (y_i / x_i)$$

di mana y_i dan x_i adalah masing-masing pangsa parameter yang diukur dan pangsa populasi kelompok ke- i .

Secara spesifik formula penghitungan Koefisien Theil adalah seperti berikut ini.

- (1) Keragaman kesempatan kerja atau pendapatan seluruh propinsi.

$$T = \sum_{j=1}^{27} y_j \log (y_j / x_j)$$

di mana y_j dan x_j adalah masing-masing pangsa kesempatan kerja atau pendapatan dari propinsi ke- j .

- (2) Keragaman kesempatan kerja atau pendapatan antarpropinsi di masing-masing wilayah.

$$T = \sum_{k=1}^m y_k \log (y_k / x_k)$$

di mana y_k dan x_k adalah masing-masing pangsa kesempatan kerja atau pendapatan dan pangsa propinsi ke- k di masing-masing wilayah.

(3) Keragaman kesempatan kerja atau pendapatan antarwilayah

$$T = \sum_{l=1}^5 y_l \log (y_l / x_l)$$

di mana y_l dan x_l adalah masing-masing pangsa kesempatan kerja atau pendapatan dan pangsa wilayah ke- l .

KESENJANGAN KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN

Bagian ini mendiskusikan dua aspek pokok yaitu keragaman kesempatan kerja dan keragaman tingkat pendapatan antarwilayah dan propinsi. Masing-masing aspek akan didiskusikan secara terpisah walaupun deskripsi keterkaitan antarkeduaanya juga mendapat perhatian

Keragaman Kesempatan Kerja

Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa kesempatan kerja merupakan indikator keberhasilan program pembangunan di suatu wilayah. Artinya, pelaksanaan program pembangunan di wilayah tertentu yang mampu memperluas kesempatan kerja bagi anggota masyarakatnya dinilai sebagai wilayah yang berhasil melaksanakan program pembangunannya. Namun, keberhasilan tersebut erat hubungannya dengan potensi sumber daya yang ada dan tingkat efisiensi pemanfaatannya. Semakin potensial sumber daya tersedia di suatu wilayah dan dapat dimanfaatkan secara efisien dapat diharapkan kesempatan kerja tersedia di wilayah yang bersangkutan semakin luas pula. Bertolak dari kenyataan bahwa potensi sumber daya yang tersedia dan tingkat efisiensi yang bervariasi antarwilayah dan propinsi maka diduga baik kesempatan kerja maupun tingkat pendapatan juga bervariasi. Hasil perhitungan keragaman tersebut disajikan pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa kesempatan kerja antarwilayah tidak memperlihatkan keragaman yang besar. Ditunjukkan oleh Koefisien Theil yang rendah. Wilayah Sulawesi yang memiliki kesempatan kerja paling rendah hanya 15 persen lebih kecil daripada Wilayah Indonesia Timur yang merupakan wilayah dengan kesempatan kerja yang tertinggi. Kecilnya variasi dan keragaman kesempatan kerja antarwilayah mengindikasikan bahwa secara umum rata-rata keberhasilan program pembangunan di wilayah-wilayah di Indonesia dalam hal penyediaan kesempatan kerja tidak memperlihatkan perbedaan yang menonjol.

Berbeda dengan keragaman antarwilayah, perbandingan antarpropinsi ternyata relatif lebih tinggi (Koefisien Theil lebih besar). Hal ini diperjelas dengan kesenjangan yang tinggi antara kesempatan kerja di DKI Jakarta yang merupakan propinsi paling rendah yang hanya 65.5 persen dibandingkan dengan Propinsi Bali yang memiliki kesempatan kerja tertinggi.

Tabel 1. Keragaman Kesempatan Kerja Antarwilayah dan Propinsi di Indonesia

Wilayah	Koefisien Theil	% pekerja per usia kerja	Tertinggi (persen)	Terendah (persen)
Sumatera	0,00069	52,13	Bengkulu (58,02)	Riau (48,02)
Jawa	0,003119	51,95	DIY (57,46)	DKI Jkt (42,75)
Kalimantan	0,000448	55,81	Kalbar (58,02)	Kaltim (51,08)
Sulawesi	0,001484	50,41	Sulteng (54,74)	Sulsel (44,68)
Bali, N Tengg. Maluku dan Irja	0,002475	58,76	Bali (65,31)	Maluku (46,17)
Antarwilayah	0,000655	53,82	Bali, N Tengg. Mlk & Irja	Sulawesi
Antarpropinsi	0,002461	53,87	Bali	DKI Jkt

Sumber :Diolah dari BPS (1996: berbagai Tabel)

Rendahnya kesempatan kerja di DKI Jakarta dibandingkan dengan di Bali kiranya erat hubungannya dengan proporsi usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja. Kelompok usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja, selain sedang dalam status sekolah kegiatan nonekonomi yaitu mengurus rumah tangga termasuk porsi yang besar. Di DKI Jakarta porsi usia kerja yang mengurus rumah tangga mencapai 44,6 persen yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat di Bali, 31,4 persen (BPS, 1995). Dengan demikian secara agregat terlihat bahwa porsi usia kerja yang bekerja di DKI Jakarta lebih rendah daripada di Bali.

Walaupun tidak menunjukkan keragaman atau variasi yang mencolok, bila dirinci keragaman antarpropinsi dalam masing-masing wilayah kesenjangan kesempatan kerja dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu wilayah dengan keragaman yang tinggi dan keragaman yang rendah. Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi digolongkan ke dalam wilayah dengan tingkat keragaman yang rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya Koefisien Theil dan kecilnya angka perbedaan antara propinsi dengan kesempatan kerja tertinggi dan yang terendah (*range*). Sementara itu, Wilayah Jawa dan Indonesia Timur merupakan wilayah dengan tingkat keragaman yang lebih tinggi. Nilai Koefisien Theil yang tinggi disertai dengan angka *range* yang tinggi pula.

Keragaman Tingkat Pendapatan

Seperti halnya kesenjangan kesempatan kerja yang didiskusikan di depan, keragaman tingkat pendapatan pun mempunyai kecenderungan yang serupa. Keragaman tingkat pendapatan antarpropinsi relatif lebih besar daripada keragaman antarwilayah di Indonesia (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Keragaman dan Variasi Tingkat Pendapatan Antarwilayah dan Propinsi di Indonesia

Wilayah	Koefisien Theil	PDRB/Kapita (Rp 000)	Tertinggi (Rp 000)	Terendah (Rp 000)
Sumatera	0,007781	1,746	Riau (2,194)	Lampung (1,212)
Jawa	0,105001	2,937	DKI Jkt (7,508)	Jateng (2,937)
Kalimantan	0,031114	2,959	Kaltim (4,939)	Kalbar (1,977)
Sulawesi	0,00098	1,308	Sulut (1,371)	Sultra (1,160)
Bali, N Tengg. Maluku dan Irja	0,071656	1,695	Irian Jaya (3,503)	NTT (809)
Antarwilayah	0,022416	2,129	Kalimantan	Sulawesi
Antarpropinsi	0,069095	2,070	DKI Jkt	NTT

Sumber : Dolah dari BPS, 1996)

Bila dicernati lebih jauh dari Tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa kesenjangan tingkat pendapatan relatif tinggi di semua wilayah yang ditunjukkan oleh tingginya Koefisien Theil, kecuali di Wilayah Sulawesi. Propinsi Lampung misalnya, yang mempunyai tingkat pendapatan rata-rata paling rendah, hanya sekitar 55 persen dibandingkan dengan tingkat pendapatan di Propinsi Riau yang mempunyai tingkat pendapatan tertinggi di Wilayah Sumatera. Sementara Propinsi Jawa Tengah kurang dari 40 persen dibandingkan Propinsi DKI Jakarta di Wilayah Jawa. Kalimantan Barat hanya 40 persen terhadap Kalimantan Timur di Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur yang hanya 23 persen dibandingkan dengan Irian Jaya di Wilayah Indonesia Timur. Padahal Propinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai tingkat pendapatan terendah di Wilayah Sulawesi mencapai 85 persen dibandingkan dengan Sulawesi Utara dengan tingkat pendapatan tertinggi di wilayah tersebut.

Perbedaan-perbedaan tingkat pendapatan yang terjadi diduga erat kaitannya dengan ketersediaan potensi sumber daya alam dan volume aktivitas ekonomi di wilayah atau propinsi yang bersangkutan. DKI Jakarta mempunyai tingkat pendapatan yang tertinggi dari seluruh propinsi di Indonesia. Walaupun propinsi ini memiliki sumber daya alam yang terbatas, tapi kegiatan ekonomi didominasi oleh kegiatan di sektor industri dan jasa atau sektor modern yang mempunyai produktivitas faktor-faktor produksi yang tinggi.

Sebaliknya, propinsi seperti Nusa Tenggara Timur dengan kegiatan ekonomi yang didominasi oleh kegiatan di sektor pertanian lahan kering dengan produktivitas rendah atau sektor tradisional menjadikan propinsi ini sebagai propinsi dengan tingkat pendapatan yang paling rendah.

Keterkaitan Antara Kesempatan Kerja dan Tingkat Pendapatan

Selain mendiskusikan keragaman kesempatan kerja dan keragaman tingkat pendapatan secara terpisah, tulisan ini juga mendiskusikan keterkaitan antara kedua indikator tersebut dan perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Propinsi Riau yang memiliki kesempatan kerja paling rendah di Wilayah Sumatera, tapi propinsi ini justru memiliki tingkat pendapatan yang tertinggi. Diduga hal ini erat kaitannya dengan produktivitas faktor-faktor produksi yang ada di propinsi tersebut. Persentase pekerja yang bekerja di sektor pertanian di Propinsi Riau mencapai 52.7 persen yang bagian terbesar daripadanya bekerja di subsektor perkebunan, khususnya perkebunan besar yang pada kenyataannya mempunyai produktivitas pekerja yang lebih tinggi dan mampu menyumbang PDRB yang lebih tinggi. Sementara Propinsi Lampung di wilayah yang sama dengan aktivitas ekonomi sebagian besar anggota masyarakatnya di sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan rakyat mempunyai produktivitas pekerja yang lebih rendah dan memberikan PDRB yang rendah pula.

Kecenderungan serupa juga dijumpai di Wilayah Jawa. DKI Jakarta memiliki kesempatan kerja yang terendah tapi tingkat pendapatannya merupakan yang tertinggi di wilayah ini. Kalau di Propinsi Riau, tingginya produktivitas faktor-faktor produksi di subsektor perkebunan tapi di DKI Jakarta, tingginya produktivitas faktor-faktor produksi di sektor industri dan jasa yang menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi. Sementara di DI Yogyakarta yang merupakan propinsi tertinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja di Wilayah Jawa tapi memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Sama seperti di Wilayah Sumatera dan Jawa, di Wilayah Kalimantan pun terjadi hal yang serupa di mana Propinsi Kalimantan Barat yang mampu menyerap tenaga kerja yang tertinggi namun tingkat pendapatan justru menempati urutan yang paling rendah. Sebaliknya di Kalimantan Timur penyerapan tenaga kerja yang paling rendah tapi tingkat pendapatannya justru paling tinggi di Wilayah Kalimantan. Di Kalimantan Barat sektor terbesar menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian (69,9 %), sementara sektor yang sama menyerap tenaga kerja di Kalimantan Timur jauh lebih rendah (37,6 %). Kiranya sektor industri pengolahan merupakan sektor penting di Propinsi Kalimantan Timur yang memiliki produktivitas faktor-faktor produksi yang lebih tinggi.

Di Wilayah Sulawesi tidak menunjukkan keterkaitan yang jelas antara kesempatan kerja dan tingkat pendapatan. Propinsi Sulawesi Tengah merupakan propinsi yang tertinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja dan Propinsi Sulawesi Selatan merupakan yang terendah. Sementara itu, Sulawesi Utara merupakan propinsi dengan tingkat pendapatan tertinggi di wilayah ini sedangkan Propinsi Sulawesi Tenggara menempati urutan yang terendah. Di keempat propinsi di Wilayah Sulawesi sektor pertanian merupakan sektor utama bagi perekonomian masyarakat. Tingkat pendapatan di semua propinsi di wilayah ini tidak banyak bervariasi seperti telah diungkapkan pada bagian terdahulu tulisan ini.

Untuk Wilayah Indonesia Timur, Propinsi Bali merupakan propinsi paling tinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kegiatan-kegiatan di propinsi ini bukanlah kegiatan-kegiatan dengan produktivitas faktor-faktor produksi yang tinggi tapi lebih didominasi oleh sektor jasa dan sektor informal. Dengan alasan ini walaupun porsi usia kerja yang terserap sebagai pekerja cukup tinggi tidak diiringi dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Agak berbeda dengan Propinsi Irian Jaya, tingkat pendapatan propinsi ini tertinggi di Wilayah Indonesia Timur. Padahal porsi terbesar kegiatan masyarakat di sini adalah di sektor pertanian (hampir 75 %). Ternyata sumbangan terbesar terhadap pendapatan di Irian Jaya berasal dari sektor pertambangan dan galian. Sementara propinsi dengan tingkat pendapatan terendah di Wilayah Indonesia Timur adalah Nusa Tenggara Timur. Lebih dari 70 persen pekerja di propinsi ini terserap di sektor pertanian. Tapi dengan produktivitas faktor produksi lahan pertanian yang masih rendah menjadikan propinsi ini memiliki tingkat pendapatan yang rendah pula.

KESIMPULAN

Keragaman kesempatan kerja lebih menonjol antarpropinsi dibandingkan dengan antarwilayah di Indonesia. Propinsi dengan tingkat kesempatan kerja yang rendah seperti DKI Jakarta disebabkan karena sebagian besar porsi usia kerja yang termasuk dalam status sekolah dan mengurus rumah tangga tidak bekerja. Sebaliknya, Propinsi Bali yang memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi, sebagian besar porsi usia kerja dalam kedua status tersebut melakukan berbagai jenis pekerjaan.

Perbedaan tingkat pendapatan antarwilayah dan propinsi erat kaitannya dengan ketersediaan potensi sumber daya alam dan volume aktivitas ekonomi. Tingginya volume aktivitas ekonomi di DKI Jakarta yang didominasi oleh sektor industri dan jasa atau sektor modern memiliki produktivitas faktor-faktor produksi yang tinggi. Sebaliknya, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan kegiatan ekonomi yang didominasi oleh kegiatan di sektor pertanian lahan kering dengan produktivitas rendah atau sektor tradisional menghasilkan tingkat PDRB yang lebih rendah.

Wilayah atau propinsi yang mampu menyediakan lapangan kerja yang luas tidak selalu diikuti oleh tingkat pendapatan yang tinggi pula. Tingkat pendapatan lebih dipengaruhi oleh produktivitas faktor-faktor produksi yang ada dan dengan pengelolaan secara efisien. Di propinsi-propinsi seperti Riau, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur yang memiliki produktivitas faktor-faktor produksi yang tinggi, walaupun kesempatan kerja yang tersedia relatif rendah dibandingkan propinsi-propinsi lain di wilayahnya tapi justru memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Sementara propinsi-propinsi seperti Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur, walaupun mampu menyediakan kesempatan kerja yang luas di sektor pertanian tapi memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah karena rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik. 1996. Statistik Indonesia 1995. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Fishlow, A. 1972. On the Emerging Problems of Development Policy: Brazilian Size Distribution of Income. The Amer. Econ. Rev. Papers and Proceedings. Vol. 62:391-402.
- Hirsh, B.T., T.G. Seaks and J.P. Formby. 1980. Inter-Age and Intra-Age Income Inequality: A Cross-Sectional Analysis. Southern Econ. Jour. Vol. 46 (4) :1187-96.
- Islam, I. And H. Khan. 1986. Spatial Patterns of Inequality and Poverty in Indonesia. Bull. Of Indonesia Econ. Stud. Vol. 22 (2) : 1653-78.
- Levy, A. and K. Chowdhury. 1993. Intercountry Income Inequality 1960-1990: World Levels and Decomposition Between and Within Geographical Clusters and regions. Working Paper Series. No. WP 93-9. The University of Wollongong, Department of Economics
- Marisa, Y and B. Hutabarat. 1989. Analisis Usahatani Padi di Sulawesi Selatan. *dalam*: Kasryno, F. dkk (Eds). Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Prosiding Patanas. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor.
- Nurmanaf, A.R. 1989. Struktur dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan di Lampung. Dalam: Pasandaran, E. dkk. (Eds). Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Nurmanaf, A.R. 1995. Farm Household Income in Indonesia. Seminar and Working Paper No. 95-21. Faculty of Business and Computing. Southern Cross University, Coffs Harbour Campus. Antraha.
- Plotnick, R.D. 1982. Trends in Male Earnings Inequality. Southern Econ. Jour. Vol. 40 (3) : 724-32.
- Yotopoulos, P.A. and J.B. Nugent. 1976. Economics of Development: Empirical Investigations. Harper & Row Publishers. New York.